



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 97 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dari kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dalam rangka memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi secara terpadu dalam penyelesaian kegiatan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.
- KETIGA** : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 MARET 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 97 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 19 MARET 2021****SUSUNAN TIM ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah mengarahkan pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Bersama Gubernur mengarahkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Melakukan Koordinasi di Bidang : a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2021; b. penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020; c. melakukan Koordinasi tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; d. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020; dan e. bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator I	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, Pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Pemerintahan dan Kesra.

5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator II	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, Pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
6	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator III	Membantu Koordinator dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, Pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Administrasi Umum.
7	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2021; b. memimpin Rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD Tahun Anggaran 2021; c. bertanggung jawab Rapat atas Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan APBD Tahun Anggaran 2021; d. melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.
8	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT meliputi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu; b. mengoordinir dan meneliti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021; c. mengkonsolidasi Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dari Perangkat Daerah pengelola dana APBD; dan d. mengoreksi hasil pemeriksaan SPJ dan menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SPJ berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi pertanggung jawaban APBD.

9	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<p>a. mengoreksi dan meyempurnakan konsep Rancangan Anggaran Penanganan Urusan Pemerintah Provinsi (KUA dan PPAS) berdasarkan RKPD dan RPJMD sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;</p> <p>b. mereviu dan membahas RKA-SKPD bersama TAPD berdasarkan KUA dan PPAS untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan PERda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;</p> <p>c. mengoreksi dan meyempurnakan konsep Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan KUA dan PPAS untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda dan Pergub;</p> <p>d. meneliti dan mengoreksi DPA Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan Penjabaran APBD untuk dijadikan dasar pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah; dan</p> <p>e. mengoreksi dan meneliti usulan perubahan anggaran daerah atas usulan perubahan anggaran dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk bahan Penyusunan Anggaran Perubahan Daerah Tahun Anggaran 2021.</p>
10	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<p>a. merencanakan langkah-langkah operasional pengelolaan keuangan daerah meliputi : menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD dan menandatangani SP2D;</p> <p>b. koordinator TPKN;</p> <p>c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2021 oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainya yang ditunjuk; dan</p> <p>d. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah.</p>

11	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Daerah dan pelaporan kinerja lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan; b. menyelenggarakan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja SKPD; dan c. melakukan koordinasi pencatatan dan pelaporan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
12	Kabid. Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengarahkan dan penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Ranpergub tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada 22 Kab/Kota; b. melakukan evaluasi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di 22 Kab/Kota; c. menganalisa rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, serta Ranperda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 di 22 Kab/Kota dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah; dan d. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil dari APBD Provinsi pada APBD Kabupaten/ Kota.

13	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan pelaporan kinerja lainnya yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja dan masukan bagi atasan.
14	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD; b. memverifikasi dan membuat pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran Tahun Anggaran 2021; dan c. mengontrol administrasi pengelolaan keuangan agar tertib administrasi.
15	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
16	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021; b. memeriksa pelaksanaan anggaran Daerah Tahun Anggaran 2021; c. melakukan verifikasi SKRD dan STS yang dikirim bendahara Penerimaan untuk meneliti kembali sisi Kas yang belum setor dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ Pendapatan Perangkat Daerah; d. meneliti kebenaran bukti pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan beserta Lampiran-lampirannya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan; e. mencatat semua tanda setoran serta STS penerimaan kas ke dalam buku Bantu atau buku kontrol untuk tertib administrasi; dan f. melakukan verifikasi pendapatan BLUD untuk disahkan oleh pimpinan sebagai PPKD.

17	Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada satuan kerja sebagai bahan penyusunan neraca keuangan dan aset daerah; b. melakukan verifikasi SPM UP/GU/TU, dengan cara meneliti dokumen yang dikirm bendahara pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan dan memberikan advise pada nota catatan hasil pemeriksaan SPJ dan Belanja Daerah; dan c. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data analisis terhadap anggaran belanja Perangkat Daerah agar terkumpul data serta dapat memberikan rekomendasi untuk pengajuan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
18	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkaji dan atau mengolah data laporan keuangan pada Perangkat Daerah agar tersedia data yang valid dan akuntabel; b. meneliti kebenaran dan kelayakan pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung jawaban; c. menyiapkan perangkat PKD khususnya Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; d. menyusun Laporan Konsolidasi Tahunan Pemerintah Daerah; e. menyusun dan merencanakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan investasi daerah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku agar terciptanya keteraturan pengelolaan investasi.

19	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun konsep KUA dan PPAS untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. menyiapkan bahan-bahan dan data serta memfasilitasi pembahasan RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan; c. mereviu dan membahas RKA-Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; d. menyusun dan meneliti konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Lampirannya; e. menyusun dan meneliti Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBDn bersama Lampiran buku penjabaran Perubahann APBD Bidang Perekonomian dan Pembangunan; f. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah; dan g. menyusun rencana anggaran belanja provinsi Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang akan dibiayai dari dana DAK.
20	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta membantu menyusun konsep tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi DPRD tentang Nota Keuangan Khusus yang berkaitan dengan Bidang Administrasi Umum; b. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD Bidang Administrasi Umum;

			<ul style="list-style-type: none"> c. menyiapkan bahan materi dan menyusun pedoman, standar satuan harga dan analisis belanja daerah, norma, kriteria pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia pedoman penyusunan anggaran yang berpihak pada masyarakat; d. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkungan Bidang Administrasi Umum; e. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; f. meneliti usulan revisi DPA-PD dan menyusun konsep surat tanggapan terhadap usulan revisi dari PD lingkup Bidang Administrasi Umum; dan g. mengatur pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk penyusunan Anggaran Daerah Bidang Administrasi Umum.
21	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Kesra pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun dan meneliti konsep Rencana Anggaran Kas dan SPD untuk PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. menyiapkan data dan menyusun konsep kebijakan pendanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi tanggung jawab bersama antara provinsi dan Kabupaten/Kota; dan d. melakukan konsultasi dengan instansi/Pihak-Pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

22	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. meneliti dan mengkaji kelayakan materi evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 serta Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk wilayah Flores sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengesahan;</p> <p>b. menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;</p> <p>c. mengatur dan melaksanakan pendistribusian Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perubahan APBD TA. 2021 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan</p> <p>d. menghimpun, mengolah dan menyusun rekapitulasi dana APBD TA. 2021, Perubahan APBD TA. 2020 dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/Kota Wilayah I untuk Wilayah Flores berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersedia data APBD secara baik dan benar.</p>
23	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten Wilayah II untuk Wilayah Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua serta perkembangannya;</p> <p>b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten Wilayah II untuk Wilayah sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua;</p> <p>c. mengkaji dan mengidentifikasi Perubahan APBD TA. 2021 dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>d. melaksanakan koordinasi pengusulan DAK Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan benar.</p>

24	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. Menyajikan data keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao TA. 2021 dalam format evaluasi;</p> <p>b. menyusun dan mengidentifikasi laporan permasalahan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao serta perkembangannya; dan</p> <p>c. menyusun dan/atau mengoreksi konsep Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2020 Kabupaten/Kota Wilayah III untuk Wilayah Timor dan Rote Ndao berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.</p>
25	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pembangunan, Kesra dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengujian tagihan pembayaran berdasarkan SPM yang diajukan oleh Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. menguji kelayakan pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang PERSediaan serta LS Barang dan Jasa;</p> <p>c. meneliti jumlah pembayaran yang diberikan berdasarkan ketersediaan dana;</p> <p>d. memaraf rekapitulasi pembayaran menurut rekening kas umum daerah; dan</p> <p>e. membuat laporan pelaksanaan penerimaan dana transfer, dana hibah Bantuan Luar Negeri (BLN).</p>
26	Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;</p> <p>b. menghimpun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. melakukan penagihan piutang daerah; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.</p>

27	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pembinaan Bendahara pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghimpun dan menganalisa data serta menyajikan laporan hasil kegiatan;</p> <p>b. menghimpun konsep Keputusan Gubernur tentang penunjukan pejabat pengelola APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>c. melakukan penagihan piutang daerah; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas Sekretaris Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengembalian kerugian daerah.</p>
28	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I Menyelesaikan tugas-tugas yaitu Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
30	Kristianus Th. K. Assan, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31	Juliana Selfintje Ngale, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
32	Yeti Marliana Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
33	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
34	Afliana N. B. Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

35	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I Menyelesaikan tugas-tugas yaitu Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36	Nuzulul Atmayudha Putri, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
37	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
38	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
39	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
40	Yustina Somi, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
41	Antonius Dionisius Lamahoda, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
42	Alexander Sina Wuan, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
43	Maria Elisabeth Th.M. Repu, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
44	Villigius Raga Pita/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
45	Lylia Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

46	Musa Sufi Duru/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua I Menyelesaikan tugas-tugas yaitu Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
47	Maria Selvyana Lalu Beo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II dalam menyelenggarakan langkah-langkah operasional dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
48	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
49	Patrisia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
50	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
51	Joab Beda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
52	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
53	Alfrit Alfianto Fangidae, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
54	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
55	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

56	Anselmus Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua II dalam menyelenggarakan langkah-langkah operasional dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan, standar biaya, dana cadangan dan investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
57	Marselinus Nani, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
58	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
59	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
60	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
61	Roy Richardson O. Laikopan, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
62	Ivan Jerry Putra Adoe/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
63	Ni Wayan Bagiani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota, Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan APBD Kabupaten dan Kota meliputi Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I (Flores), Wilayah II (Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua) dan Wilayah III (Timor dan Rote Ndao) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64	Magdalena A. Willa Tiro, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

65	Yohanes Baptista Eko Prasetyo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota, Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan APBD Kabupaten dan Kota meliputi Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I (Flores), Wilayah II (Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua) dan Wilayah III (Timor dan Rote Ndao) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66	Yane Kornelia Liu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
67	Christina Mega Putri Komar, S. IP/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
68	Felixianus Siger Loba Randu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
69	Putri Rani Ari Sandi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
70	Siti Aisyah Rahmawati, SE, M.Acc/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
71	Frederikus R. Mite/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
72	Christian Nalle/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
73	Adrianus Banu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
74	Andry Anin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
75	Herlin Yudensiana Hane, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

76	Maria Margareta Dhey, S.Sos/ Staf Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris II dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/ Kota, Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan APBD Kabupaten dan Kota meliputi Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I (Flores), Wilayah II (Sumba, Lembata, Alor dan Sabu Raijua) dan Wilayah III (Timor dan Rote Ndao) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77	Napoleao Januario Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
78	Yohanes Keko/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
79	Simon O. Mere Djoka/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
80	Dian Sugiarto Putra Hendrikus, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
81	Oktaviani Wowor, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
82	Samuel Herdi Watileo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
83	Febriana Crisanty Senin, S.AB/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
84	Dina R. T. Djawa, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
85	Jun Erna Nawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

86	Teresa De Jesus, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
87	Arifin, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
88	Charles Nehemia Polin, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
89	Alexander Agung Watu Raka, S. Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
90	Celsilia Denciana/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
91	Lourdes Vicente Viegas/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
92	Vebby Rycke Saba, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
93	Marselina Ariany Pekambani, S. STP/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
94	Jabalnur Kanda, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
95	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
96	Nencylia Carolin Handatu, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

97	Nyoman A. K. Ch. Marthayasa, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
98	Klau Marini G. Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
99	Febrina Mone/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
100	Marthina Tiro, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
101	Henderina Kaho, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
102	Ignacio Ignasius L. Sada Sela, S.Pi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
103	Subeny Sulistywati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
104	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
105	Fenizia Maia Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
106	Ester Maria V. V. De Jesus, S.Km/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
107	Cayan Magdalena Henderwantry Poeh, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

108	Maria M. Usfinit/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris I untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2021 pada Badan Keuangan Daerah.
109	Yutria Seran Malik, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
110	Adrian L. Baimetan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
111	Ebriance Mbuik, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
112	Paula E. R. Ngoma Sabarua, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
113	Anselmus Asuat/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
114	Lily Desryanti Koli, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
115	Endaryati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang perbendaharaan.
116	Ristyowati/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
117	Agatha Lusia Abuk, A. Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

118	Adel Meryquin A. Maing, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang perbendaharaan.
119	Asran Irawan Sanda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
120	Abdul Haris Mau, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
121	Moises Do Rego/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
122	Yane A. Watilweo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
123	Wilhelmus P. Geto/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
124	Matheos Wenyi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
125	Anastasia Krisnawaty Kenahin, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
126	Ita Marlina Feri Aritonang, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
127	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
128	Reginaldo Kapilawi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
129	Welmince Baitanu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

130	Wilson Tiger Seo Man Mone, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Wakil Ketua III dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, dan pembinaan bendahara, pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan, administrasi umum, perekonomian dan pembangunan dan investasi serta mendistribusikan tugas penyusunan anggaran bidang perbendaharaan.
131	Sefrin Arianto Baun, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
132	Fransiska C. Yeni Endy, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
133	Yanuario A. N. Dhaki, ST/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
134	Siprianus Seberan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
135	Yosep Fransiskus Dalla, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
136	Maria Anastasia Moi Balu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
137	Oktovianus Saka, S.AK/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014